

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN BATU BARA
(STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR BATU BARA)**

SKRIPSI

OLEH :

RAMAYANTI SINAGA

NPM: 18.840.0123



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI
KABUPATEN BATU BARA
(STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR BATU BARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1)
Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Medan Area

OLEH

RAMAYANTI SINAGA

188400123

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SEKRIPSI

Judul skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten
Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)
Nama : Ramayanti Sinaga
Jurusan : Kependanaan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

(Hj. Jamillah, SH., MH)

Pembimbing II

(Dr. Wessy Trisna, SH., MH)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramayanti Sinaga

Npm : 188400123

Judul skripsi : Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun



Medan, 20 Oktober
2022Penulis



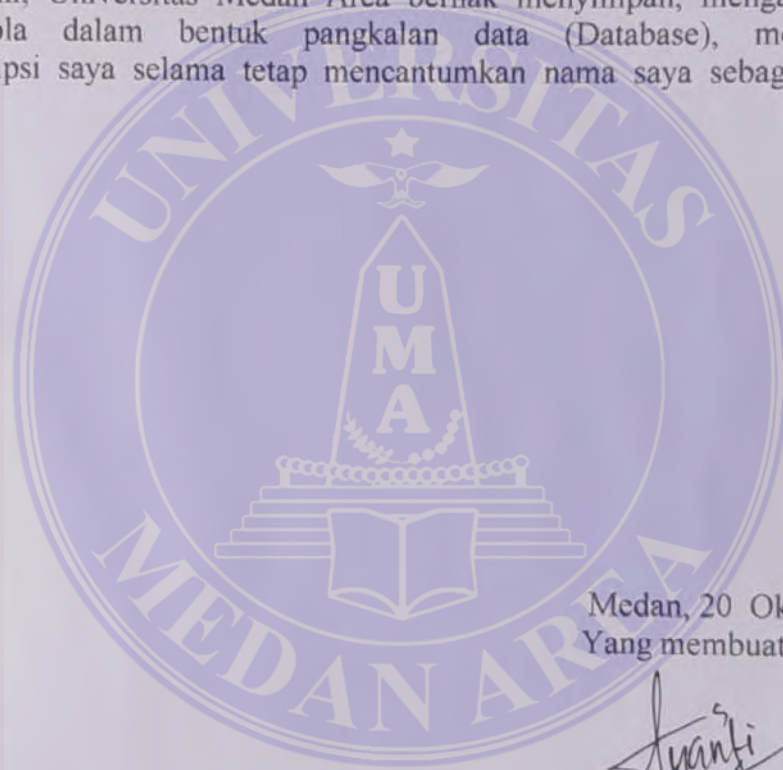
Ramayanti Sinaga
Ramayanti Sinaga

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area,
saya yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Ramayanti Sinaga
Npm : 188400123
Fakultas : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan hak bebas royalti non -eklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta.



Medan, 20 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan

Ramayanti Sinaga

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pulau Burung Pada tanggal 27 Mei 2000 dari ayah Pantas Sinaga dan Ibu Rumintang Situmorang. Penulis merupakan Putri Kelima dari Sembilan Bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Meranti dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis memfokuskan untuk lebih serius dalam mengikuti perkuliahan. Pada tahun 2021 Penulis melaksanakan Praktek klinis 1 dan klinis 2. Selama menjadi mahasiswi Hukum di Universitas Medan Area Penulis Memang tidak terlalu sibuk dalam aktifitas organisasi, namun puji tuhan penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan tepat waktu.



ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI
KABUPATEN BATU BARA
(STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR BATU BARA)

OLEH:

RAMAYANTI SINAGA

NPM: 188400123

Judi togel merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi kesejahteraan umum masyarakat. Karena pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana judi togel dalam kehidupan masyarakat, Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana judi togel di Kabupaten Batu Bara, Bagaimana Penegakan hukum atas tindak pidana judi togel oleh kepolisian resor batu bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif berdasarkan pembahasan maka ditemukan bahwa Masyarakat sangat terobsesi dengan iming-iming menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta benda berharga tanpa memikirkan akibat yang akan didapat, beberapa dampak yang ditimbulkan judi togel yang pertama Masyarakat miskin semakin terjebak dalam masalah ekonomi. Terjadi Tindak Kriminal lain pada Masyarakat Miskin Akibat Togel. Membuat Masyarakat Miskin Terlilit Utang. Dan Dikucilkan oleh Masyarakat. Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian ada dua faktor. Yang pertama Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dalam diri si pelaku judi togel yaitu Faktor Kesenangan, dan Faktor keagamaan, yang kedua Faktor eksternal adalah segala faktor dari luar diri pemain judi togel yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor Lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel ini dilakukan dengan cara, yaitu: Preventif (Pencegahan) kepolisian resor batu bara Melaksanakan pembinaan, melakukan penyuluhan, bekerjasama dengan masyarakat, dan menyebar informan. Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh kepolisian dengan menindak pelaku kejahatan, yaitu dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Togel, Kabupaten Batu Bara.

ABSTRACT

THE LAW ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL ACTION OF TOGELGAMBLING IN BATU BARA REGENCY (A STUDY AT BATU BARA RESORTPOLICE OFFICE)

BY:

RAMAYANTI SINAGA

REG. NUMBER: 188400123

Togel gambling is a social problem that has a negative impact on the general welfare of society. The essence of gambling is an act contrary to religious norms, morals, decency, and law. Law enforcement is a process to embody the legal wishes so that it becomes an obligation and is obeyed by the community. Law enforcement is to improve order and legal certainty in society. Law enforcement on the criminal activities of gambling in Indonesia is conducted by the police due to the crime being related to the problem of country security and order. Problems in the research were what impact of Togel gambling criminal action on people's lives, what factors cause the occurrence of Togel gambling criminal action in Batu Bara Regency, and what law enforcement on Togel gambling criminal action by Batu Bara resort police. The research method used in this research was normative juridical. The research was descriptive analysis using data collection techniques carried out in three ways, namely library research, field research, and interviews. It was analyzed qualitatively and presented descriptively based on the discussion that the community was very obsessed with the lure of getting rich by risking all kinds of valuable assets without thinking about the consequences that would be obtained. Some of the effects of Togel gambling, first the poor were increasingly trapped in economic problems, and other crimes occurred in poor people due to Togel gambling, causing the poor in debt, and ostracized by society. There were two factors that caused gambling. The first was internal factors, which were all factors originating within the Togel gambler, namely the fun and religious factors. The second was external factors, which were all factors from outside the Togel gambler, namely economic and environmental factors. Law enforcement on the criminal activities of Togel gambling was carried out in the following ways: Preventive (Prevention) by Batu Bara resort police through Implementing coaching, conducting counseling, collaborating with the community, and disseminating informants, Repressive (prosecution) by the police in taking action against criminals through inquiries and investigations.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Act, Togel Gambling, Batu Bara Regency.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan yesus kristus, yang telah menjadi tempat sandaran dan pergumulan selama penulisan skripsi ini. Oleh berkat dan kuasanya sajalah, penulis dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Batu Bara (Studi Pada Kantor Kepolisian Resor Batu Bara)”**. Dimana penyusuna dan penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

Selama pembuatan dan penelitian skripsi ini, banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun tuntunan Tuhan yesus, usaha maksimal, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Penulis juga ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada orang tua yang terkasih atas kasih, doa, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sampaikan juga rasa terimakasih kepada bapak/ibu karena telah menjadi dosen pembimbing yang memberikan tuntunan dan arah dengan penuh kasih dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga sampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku dekan fakultas hukum universitas medan area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku sekretaris pembimbing dan ketua bidang program studi hukum kepidanaan fakultas hukum universitas medan area yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Jamila, SH, MH. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Wessy Trisna, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.

9. Terima kasih kepada Kepolisian Resor Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memperoleh data sebagai pendukung dalam skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak Dody Sipayung yang berada di sat reskrim Polres Batu Bara, bertakat bantuan beliau dalam penelitian saya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang paling berharga dalam hidup penulis, orang tua ku tercinta Bapak Pantas Sinaga Dan Ibu Rumintang Situmorang. Terimakasih buat perjuangan yang tidak akan pernah bisa terbalaskan, serta doa dan harapan yang dipanjatkan untuk penulis.
12. Terimakasih kepada saudara-saudaraku, Kak Fera, Kak Dani, Kak Sona, Kak Hervi, Adek Lina, Adek Nopa, Itoku Windu, Adek Ika Dan Ito Diman. Buat dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada kakak dan abang saya Mawarni Sinaga, SH Dan Martanda Sinaga, SH
14. Teman-temanku Lisbeth Sinaga, Romi yana Manik, Risda Sihaloho ,Cessy Sitepu, Mawar K. Ginting dan Cindy Hutagalung. Terimakasih telah bersama penulis melewati hari-hari selama masa perkuliahanku.
15. Kepada Teman Masa SMA penulis Sariaman Panjaitan, S.P terimakasih buat waktunya, selama penelitian penulis sangat terbantu sekali atas kesediaan teman saya dalam meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.

16. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama yang baik selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.

Sebagai manusia biasa yang terbatas, tentu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga terciptanya skripsi yang lebih baik lagi di masa mendatang

Kiranya Tuhan saja yang membalas kebaikan setiap orang yang telah membantu saya, dan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat untuk penulis maupun setiap orang yang membutuhkan, serta hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan saja.



Medan, 20 Juli 2022

RAMAYANTI SINAGA
NPM : 188400123

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Uraian Umum Tentang Penegakan Hukum	12
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2. penegakan hukum tindak pidana umum dalam KUHP.....	15
3. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	20
B. Uraian Tentang Tindak Pidana.....	20
1. pengertian tindak pidana.....	21
2. unsur-unsur tindak pidana.....	23
3. jenis-jenis tindak pidana.....	24
C. Uraian Umum Tentang Perjudian.....	26
1. pengertian Perjudian.....	26
2. struktur perjudian togel.....	28
3. unsur-unsur tindak pidana perjudian.....	30
D. Uraian Tentang Kabupaten Batu Bara.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39

B. Metodologi Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. HASIL PENELITIAN	42
1. Aturan Hukum Yang Mengatur Judi Togel Di Indonesia.....	43
2. Hambatan-hambatan bagi kepolisian resor batu bara dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana judi togel.....	46
B. PEMBAHASAN.....	50
1. Dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana judi togel dalam kehidupan masyarakat.....	50
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana judi togel di Kabupaten Batu Bara.....	53
3. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Judi Togel Oleh Kepolisian Resor Batu Bara.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian telah berkembang menjadi isu sosial yang menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat biasa dan penegak hukum. Mengingat kompleksnya masalah perjudian, diperlukan solusi yang melampaui peraturan sosial dan hukum. .karena perjudian pada dasarnya merupakan pelanggaran norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum.¹

Sejauh taruhan akan bertaruh dengan sengaja, khususnya perjudian dengan nilai atau sesuatu yang dianggap penting, dengan memantau risiko dan asumsi tertentu pada saat-saat permainan, pertandingan, persaingan, dan peristiwa yang bukan atau tidak benar-benar hasilnya.²

Perjudian togel dianggap sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat dengan status menengah ke bawah dalam kondisi ekonomi yang sulit dan mengkhawatirkan, terutama di masa pandemi COVID-19, yang mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Perjudian telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Perjudian biasanya dikaitkan dengan hiburan dan kehidupan malam. Berbagai bentuk perjudian muncul di kalangan masyarakat Indonesia, yang mengakibatkan ekspansi perjudian yang pesat di Indonesia.

¹Tri Gunawan & Andriado, Ifan. *Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi "Togel": Studi Kasus Masyarakat Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang*. Jurnal Sosial HUMANIORA Dan Pendidikan. Vol 5. No 1. (2021) Hal 82.

²Septiana Erika Gubiono. *Praktik Perjudian (Studi Kasus "judi KUpon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*. Vol 24. No 2. (2015). Hal 177-178.

Penggemar perjudian bahkan lebih inventif dalam hal menciptakan bentuk perjudian baru. Misalnya, permainan judi yang sama yang dimainkan di Singapura disebut "togel" atau toto gelap di Sumatera. Praktek judi togel sekarang ini begitu marak di berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak bisa diberantas.

Bentuk perjudian yang paling terkenal, judi togel atau totoan gelap (permainan menebak angka), sering dimainkan oleh masyarakat umum. Totoan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti "menempatkan", "bertaruh", atau "bertaruh" dalam bahasa Jawa.³ Togel adalah varian dari permainan totoan gelap, di mana pemain bertaruh uang pada hasil dengan menebak angka.

Adanya hubungan sosial atau rutinitas sehari-hari merupakan dasar dari maraknya perjudian togel yang kini marak di masyarakat. Interaksi sosial yang dapat menghasilkan pertukaran sosial tercermin dalam hubungan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama.

Hasil interaksi yang menghasilkan pertukaran sosial antar manusia dalam lingkungan sosial masyarakat. Interaksi ini menyebabkan orang menyerap pengetahuan yang mereka peroleh dari menafsirkan pengalaman hidup mereka, menjadikan mereka bagian dari kehidupan para penjudi togel.

Masalah akan semakin besar jika uang yang digunakan untuk bermain judi togel adalah uang pinjaman dari rentenir yang memiliki bunga hutang, dan bisnis akan semakin sulit jika tidak dilunasi. Namun, berbeda dengan yang kalah, pemenang judi togel akan bermain untuk mendapatkan lebih banyak uang, yang berarti uangnya berlipat ganda dari yang sebelumnya tetapi habis hanya dalam

³Ayu Miracahya Intan Azania. *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*. Vol 2, No 1. (2013) Hal 177

beberapa jam. Karena seorang penggila judi togel akan melakukan apa saja untuk itu. Demi bisa menang dalam permainannya, meski harus berhutang dan menanggung akibatnya, seseorang yang berjudi secara tidak langsung berada dalam bahaya meski selalu menang. Ia hampir dipastikan akan kalah dari judi togel bahkan melebihi kemenangan yang ia peroleh. Kekalahan judi togel membuat seseorang yang terlibat dalam kejahatan lain seperti kekerasan melalui pemukulan, penyitaan, atau lebih buruk, untuk membunuh.⁴

Upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian, khususnya perjudian togel, perlu dilakukan untuk mencegah perluasnya kekerasan untuk memulai, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.⁵

Penegakan hukum adalah proses melaksanakan keinginan hukum agar masyarakat menaatinya dan menjadi kewajiban untuk melakukannya. Tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat ketertiban dan kepastian hukum masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengatur tentang lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakannya sesuai dengan proporsi ruang lingkungannya masing-masing dan atas dasar sistem kerja sama yang efektif yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan.

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum itu ditegakkan. Hal ini karena organisasi penegakan hukum

⁴ [Http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-berjudi-bentuk-bentuk-judi.htm](http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-berjudi-bentuk-bentuk-judi.htm)
1 Yang Diakses Pada 01 Maret 2022 11:48 Wib

⁵ Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Deepublish. Yogyakarta. (2019). Hal 59.

menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi.

Jika kelima pilar hukum tersebut berfungsi dengan baik, maka kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan teoritis dianggap efektif: perangkat hukum, aparat penegak hukum, anggota masyarakat yang faktornya dipengaruhi oleh ruang lingkup peraturan hukum, faktor budaya atau budaya hukum, dan fasilitas. dan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum merupakan contoh aspek hukum.⁶

Selain kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Karena perjudian dikaitkan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara, polisi di Indonesia menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan tidak hanya dapat bertumpu pada penerapan hukum pidana, tetapi juga pada kenyataan bahwa akar permasalahannya terletak pada masalah sosial, membuat kebijakan sosial penting.

Departemen pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum terdiri dari petugas polisi. Istilah "polisi" dapat digunakan untuk menggambarkan salah satu dari tiga hal: individu, organisasi (lembaga), atau fungsi. Kami biasanya menyebut Polisi sebagai sebuah institusi, yang berarti polisi. Kata bahasa Inggris "to police," yang mengacu pada pekerjaan mengamati, memantau, dan mengawasi segala sesuatu untuk mendeteksi gejala yang mungkin

⁶ Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. (2008). Vol.8. No.3. Hal 199.

timbul, memberi polisi fungsi atau arti "kata kerja". yang dilihat seorang petugas polisi diambil ke dalam otaknya, di mana mereka diproses sesuai dengan norma-normanya. Setelah itu, polisi akan melakukan segala daya untuk mengembalikan situasi ke keadaan normal.⁷

Yang dimaksud dengan istilah "polisi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. Polisi adalah alat negara dalam hal:

“Dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kata Yunani kuno "politeia," yang berarti pemerintah polis atau kota, memberi nama polisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "polisi" mengacu pada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. , seperti melakukan penangkapan terhadap orang yang melanggar hukum atau pegawai negeri yang bertanggung jawab menjaga keamanan.⁸

menelaah definisi peran polisi sebagai penegak hukum di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian, juga mengatur tentang peran Polisi.2 Tahun 2002 tentang kepolisian berbunyi sebagai berikut:

1.UU No.2 Pasal 2 Tugas Kepolisian adalah sebagai berikut:

“Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah negara bagian.”

⁷ Yulihastin, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*. Erlangga. Jakarta.(2008). Hal 3.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Bagian 1 Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002.

“Dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

mempraktekkan ketentuan Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002, pada saat sesuai dengan UU No. Tanggung jawab utama Kepolisian Negara adalah sebagai berikut:

- a. memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - b. Melaksanakan hukum; dan c. Melayani masyarakat dengan melindungi dan melindungi orang lain.
4. Tidak. 14 UU2 Tahun 2002, yang menetapkan pedoman untuk melaksanakan tanggung jawab utama yang digariskan dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bertanggung jawab untuk:

- a. sesuai kebutuhan, menegakkan peraturan, menjaga, mengawal, dan berpatroli dalam acara-acara pemerintah dan masyarakat;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan di masyarakat;
- d. berkontribusi pada penciptaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat; melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bantuan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengawasan mandiri lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, polisi berperan baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (pekerja sosial) di bidang sosial dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu,

pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace and order maintenance*) di penegakan hukum merupakan bagian universal dari fungsi lembaga kepolisian.⁹

Dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP, delik perjudian didefinisikan sebagai “ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah”.

1. Setiap orang yang mengambil kesempatan untuk memainkan taruhan yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Setiap orang yang ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum, pinggir jalan umum, atau tempat terbuka untuk umum dengan izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Perjudian memuat ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.

Berikut ini dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pengendalian Perjudian: Ancaman hukuman pada ayat (1) Pasal 303 KUHP harus diubah menjadi hukuman paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sembilan puluh ribu rupiah, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Kasus perjudian togel di Kabupaten Batu Bara dan wilayah Indonesia lainnya akan menjadi penghambat kemajuan material dan spiritual bangsa. Karena perjudian mengajarkan masyarakat bagaimana mencari nafkah dan membuat mereka “malas”. mental dan fisik yang kuat diperlukan untuk pembangunan. Masuk akal jika industri perjudian lotere perlu menemukan cara segera untuk

⁹ Muhammad Arif. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. (2021). Vol. 13. No. 1. Hal 98.

mengatasi atau menghilangkannya. Karena sangat jelas bahwa perjudian lotre adalah masalah yang berpotensi mengganggu fungsi sosial masyarakat. massa suatu masyarakat.

Untuk mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam perjudian togel, para penjudi togel hanya dikenakan hukuman maksimal dua tahun penjara. Akibatnya, perjudian togel akan diizinkan, meskipun dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, yang tidak diragukan lagi merupakan kebiasaan negatif dalam hidup masyarakat.¹⁰ Pada kenyataannya, secara umum diterima bahwa upaya pihak berwenang untuk memberantas lo Perjudian togel dan pencegahannya kurang memadai. Dikatakan cara penanganan judi togel ini bukan yang terbaik, terbukti dari: 1) Perjudian togel masih banyak terjadi di Kabupaten Batu Bara. 2) Upaya kepolisian untuk menggagalkan judi togel perjudian belum merata di setiap daerah.

Togel Singapore, Hongkong, China, dan Sydney semuanya sudah terlihat banyak dimainkan di Kabupaten Batu Bara itu sendiri. Menurut beberapa informasi mengenai hasil judi togel, hadiahnya sangat menggiurkan, seperti togel singapore jika beli dari Rp diperlukan. Hadiah sebesar Rp akan diberikan kepada nomor dua digit 1000, -.70.000, - mendapatkan Rp untuk tiga nomor. Rp. 500.000,- untuk empat angka 4.000.000,- dan seterusnya, pemain akan mendapatkan hadiah yang lebih besar untuk setiap tambahan pembelian yang mereka lakukan. Hadiah senilai Rp telah diberikan kepada pemain. 7.000.000,-

¹⁰ Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

dengan memasang 100 lembar dan dikalikan 70.000, mendorong banyak undian pemain untuk berjudi.¹¹

Karena judi togel sudah menjadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Batu Bara, anggapan masyarakat tentang kelebihan dan kekurangannya menyulitkan aparat penegak hukum untuk memberantas atau menghentikannya. Para penjudi ini beragam usia dan profesi, dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan hingga mereka yang bekerja untuk agensi.

Perjudian togel ini pun dilakukan oleh anggota generasi muda, yang berdampak negatif terhadap moral dan mentalitas mereka. Perjudian togel merupakan salah satu masalah masyarakat, dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mencegah orang melakukannya.

Sayangnya, bahkan bayi sudah tahu cara bertaruh lotre, dan lebih buruk lagi, orang tua yang memerintahkan anak-anak mereka untuk membeli lotre dari agen mereka secara tidak langsung mengajari anak-anak mereka untuk berjudi lotre.

Hanya petugas yang sering ditangkap dalam banyak kasus perjudian togel yang ditemukan di Kabupaten Batu Bara; penjudi lotere, di sisi lain, tidak pernah ditangkap. Hal inilah yang membuat para penjudi togel semakin marak karena tidak ada pemain yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengubah judul skripsi menjadi “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN BATU BARA (STUDI PADA KANTOR RESOR BATU BARA)**”.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 20:39, Didesa Sei Mentaram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana judi togel dalam kehidupan masyarakat?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana judi togel di Kabupaten Batu Bara ?
3. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana judi togel oleh Kepolisian Resor Batu Bara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana judi togel dalam kehidupan masyarakat .
2. Untuk menegtahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana judi togel di Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum atas tindak pidana judi togel oleh Kepolisian Resor Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini bisa di harapkan bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Hukum,

Jurusan Pidana dan menambah kajian perbandingan bagi menggunakan hasil penelitian ini.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara dalam mengurangi tindak pidana perjudian khususnya judi togel dan menambah wawasan tentang penegakan hukum tindak pidana judi togel. penelitian juga diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.

E. Hipotesis

Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

1. Orang yang berjudi akan menjadi tidak aktif akibat dampaknya, yang akan menaikkan angka pengangguran di Indonesia. Judi juga berdampak negatif terhadap kepribadian generasi muda bangsa di masa depan.
2. Faktor ekonomi, lingkungan, dan internal yang mendukung munculnya judi togel di Kabupaten Batu Bara yaitu tingkat keingintahuan yang tinggi dan trial and error menjadi penyebab paling umum dari fenomena tersebut.
3. Polri menggunakan penyidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana perjudian togel untuk memberantas tindak pidana perjudian togel di Resort Batubara. Dalam hal ini penyidikan didahului dengan serangkaian proses yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan hukum acara pidana..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mensejahterakan ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengatur lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup dan kewenangannya masing-masing. dasar dari sistem kerjasama yang efektif yang berkontribusi pada pencapaian tujuan.

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum itu ditegakkan. Hal ini karena organisasi penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi.¹²

Penerapan suatu keputusan dalam penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan yang tunduk pada penilaian pribadi dan tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum. Dalam Roscoe Pond, Weyne La Favre menyatakan, “Kebijaksanaan terletak pada esensi antara hukum dan moral. (etika dalam arti sempit).¹³

Penegakan hukum dimaknai oleh sebagian orang sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai ideal dan aturan (hukum) dan mewujudkannya dalam sikap perilaku, di samping berbagai kegiatan untuk menciptakan rekayasa sosial dan memelihara perdamaian sosial. Penjelasan ini

¹² Sanyoto., *Op. Cit.* hal 200-204

¹³ Laurensius Arliman. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Deepublish Yogyakarta. (2015) Hal 56

menunjukkan bahwa hukum Sistem penegakan terhubung dengan perilaku manusia di dunia nyata dan keselarasan antara nilai dan aturan hukum.¹⁴

Berikut adalah pendapat sejumlah pakar penegakan hukum. Sebagai permulaan, Andi Hamzah menegaskan bahwa istilah "penegakan hukum" sering disalahartikan hanya untuk merujuk pada represi atau hukum pidana. Dalam konteks ini, penegakan hukum reaktif dan reaktif dimasukkan. Berbeda dengan istilah bahasa Inggris "law enforcement" yang berkonotasi represif, "law compliance" yang mengacu pada "pemenuhan atau pengaturan hukum" mengacu pada tindakan preventif seperti pemberian informasi, persuasi, dan instruksi. Istilah "penegakan hukum" atau "pengendali hukum" lebih tepat.¹⁵

Memberi makna penegakan hukum adalah fokus Sudarto dan penanaman perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (onrecht in actu) maupun yang mungkin terjadi (onrecht in potentie).¹⁶ Sementara itu, menurut Satipto Raharjo, upaya dilakukan untuk membuat konsep dan gagasan menjadi kenyataan.¹⁷ Proses pemberian keinginan hukum dikenal dengan penegakan hukum. Di sini yang disebut keinginan hukum tidak lebih dari gagasan peraturan hukum untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang juga tercakup dalam proses penegakan hukum. Cara penegakan hukum itu dilakukan juga akan ditentukan oleh rumusan gagasan pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi ketidaksesuaian antara "trinitas" yang terdiri dari nilai, aturan, dan pola perilaku, maka dapat terjadi gangguan dalam penegakan hukum. Ketika

¹⁴ Jhon Kenedi. *Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*. Vol. 3. No. 1. (2014). Hal.78-80.

¹⁵ *Ibid.*, Hal 81

¹⁶ *Ibid.*, hal 84

¹⁷ *Ibid.*, hal 86

terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai berpasangan, yang tercermin dalam aturan yang ambigu dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kehidupan sosial, gangguan terjadi. Meskipun demikian di Indonesia, benar juga bahwa penegakan hukum mencakup lebih dari sekedar penegakan hukum. Akibatnya, konsep penegakan hukum mendapat pujian luas. Selain itu, ada kecenderungan kuat untuk melihat penegakan hukum sebagai tindakan yang membuat keputusan yang dibuat oleh hakim menjadi tindakan. Penting untuk dicatat bahwa pendapat yang agak sempit ini mengandung kekurangan dalam hal tersebut. bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim mengganggu kerukunan sosial.¹⁸

Setiap anggota masyarakat secara otomatis akan menyusun struktur pribadinya agar tidak melanggar hukum jika ada kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk suatu masyarakat yang aman, tertib, dan penuh tanggung jawab, seseorang harus berurusan dan tunduk sanksi hukum yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Karena upaya tersebut didorong oleh tujuan dan fungsi yang sangat mendesak yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, maka penegakan hukum menjadi penting. Berikut tujuan yang dimaksud: menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban.

Pertama, membuat permintaan dan kerukunan. Tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga ketertiban. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum adalah fakta obyektif yang berlaku untuk masyarakat dalam semua aspek kehidupan, dan

¹⁸ Zainab Ompu Jainah. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Journal Of Rural And Development*. Vol. 3. No 2. (2012). Hal 165-172

kebutuhan akan ketertiban merupakan persyaratan mendasar bagi terciptanya masyarakat manusia yang tertib.¹⁹

Kedua, menjaga keadilan. Penegakan hukum berbasis keadilan merupakan tugas berat yang membutuhkan pengorbanan dan harus terus diperjuangkan. Untuk mempelajari berbagai aspek keadilan dalam penegakan hukum, salah satunya dapat dilihat dari parameter ideologisnya, yaitu nilai dan kepercayaan yang terbentuk secara sosial.²⁰

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Umum Dalam KUHP

Perdebatan antar berbagai kekuatan politik yang tercermin dalam produk hukum menghasilkan hukum. Karena hukum merupakan alat bagi keputusan atau keinginan politik, maka pembuatan peraturan perundang-undangan didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya, legislasi menjadi isu yang kontroversial. Struktur kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat akan tercermin dalam badan legislatif.

Ada tiga buku dalam KUHP: Buku I, Buku II, dan Buku III. Prinsip-prinsip dasar dan aturan umum diatur oleh Buku I, sedangkan pelanggaran diatur oleh Buku II dan III. KUHP Indonesia yang lama mengatur semua kejahatan umum, dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat, dan dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sanksi untuk setiap kejahatan yang tercantum dalam KUHP berbeda-beda, tergantung pada kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan termasuk dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan tutup-tutup merupakan pidana

¹⁹ Kenedi, Jhon, *Op.Cit.*, Hal 83-84

²⁰ *Ibid.* Hal 84.

pokok, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan sebagian hak, penyitaan sebagian barang, dan pengumuman putusan hakim.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, proses yang negara menghukum dan mengancam penjahat melalui KUHP sangat jelas. Ancaman utama yang ditimbulkan oleh penjahat akan menjadi fokus pembahasan makalah ini.²¹

a. Pidana Mati

Mors dicitur, suplemen terakhir: Hukuman paling berat adalah hukuman mati. Kejahatanlah yang menyebabkan dia membunyikan klakson, bukan vechafaus: pelanggaran yang memalukan, bukan hukuman mati. Pembalasan atau pembalasan dan pencegahan adalah dua pembenaran utama untuk kematian hukuman. Retribusi sebenarnya bukan hanya merupakan komponen dari Hukuman Mati tetapi juga merupakan kekuatan pendorong utama di balik sistem peradilan pidana, khususnya aliran hukum pidana tradisional. Tujuan hukuman mati adalah sebagai simbol moral pelaku tercela atas kejahatan kejam yang dilakukan oleh negara.²²

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, telah diajukan uji materiil sengketa hukuman mati. Antara lain, Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi memutuskan Nomor 2 -3/PUU-V/2007 setelah melalui persidangan yang panjang, secara efektif menolak permohonan peninjauan kembali. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memberlakukan

²¹ Safaruddin Harefa. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum. Vol. 4. No 1. (2019) Hal 35-58.

²² Eddy O.S Hiarej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. (2016). Hal 453

hukuman mati sebagai undang-undang. Namun demikian. Dalam kasus a quo, tidak ada suara bulat. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim, dan empat di antaranya memiliki pandangan yang berlawanan tentang hukuman mati.²³

Menurut Pasal 11 KUHP, “Algojo di gantungan dengan mengikat tali yang diikatkan ke tiang gantungan di leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” mengatur bagaimana hukuman mati dilakukan. dianggap tidak manusiawi untuk menggunakan hukuman mati dengan cara ini, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964.2 dari 2964 (LN 1964 Nomor38) yang ditetapkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1969, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan NKRI yang menjatuhkan pidana mati. peradilan umum dan peradilan militer.

Menurut Undang-Undang a quo, pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan militer dilakukan dengan cara ditembak mati, tanpa memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang ada mengenai jalannya. dari keputusan pengadilan.

Selain itu, Polri juga mengeluarkan Peraturan No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Peraturan ini dikeluarkan oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Peraturan a quo antara lain mengatur regu tembak 14 orang yang meliputi: 1) komandan pelaksana setingkat inspektur polisi; 2) seorang pemimpin kru dengan jabatan brigadir atau bos brigadir polisi (brigadir) dan 3) 12 orang dengan jabatan brigadir polisi kedua (brigadir) atau brigadir polisi pertama (Briptu). Regu tembak bertanggung jawab untuk memeriksa senjata api, amunisi, dan peralatan lain yang digunakan dalam

²³ *Ibid.*, Hal 457.

pelaksanaan hukuman mati;menentukan susunan dan kedudukan regu tembak;dan mempersiapkan mental dan fisik setiap anggota regu tembak.²⁴

b. Pidana Penjara

adalah suatu tindak pidana yang mengakibatkan perampasan kemerdekaan seseorang dan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Eksekusi adalah pelaksanaan hukum yang kedua; Penerapan hukum berdasarkan putusan dikenal sebagai penjatuhan pidana.Hukuman mati, yang dilakukan dengan cara-cara kejam seperti rajam, pembakaran, pencekikan, dan pemenggalan kepala, dimaksudkan untuk diganti dengan penjara. Pelanggaran besar apa yang bersifat ringan: Pelanggaran kekerasan akan ditangani berat. Namun, harus ada batasan hukumannya: Poenae menahan diri.

Menurut Pasal 12 KUHP, ada dua jenis pidana penjara-penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara-berdasarkan lamanya waktu yang dijalani. Yang dimaksud dengan “penjara seumur hidup” adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

penjara untuk jangka waktu tertentu, dari satu hari sampai paling lama lima belas tahun. Tidak adanya hukuman minimum tertentu dan prevalensi minuman umum penjara selama sehari membedakan hukum pidana Belanda dari negara-negara Eropa kontinental lainnya. Jika ada yang memberatkan, seperti tindak pidana serentak, revivist, dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu, dipidana dengan pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.²⁵

c. Pidana Kurungan

²⁴ *Ibid.*, Hal 460.

²⁵ *Ibid.*, Hal 463-465

Tujuan kurungan adalah pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai kejahatan. Namun, ada beberapa kejahatan yang dapat dihukum dengan kurungan jika dilakukan dengan kecerobohan, dan ancaman penjara adalah alternatif dari penjara untuk kejahatan tersebut.²⁶ .

Sesuai dengan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan dapat ditingkatkan menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melebihi jumlah itu jika ada tindak pidana yang disebabkan oleh pengulangan atau pengulangan. berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, seperti halnya orang yang dijatuhi hukuman penjara, meskipun kewajiban ini lebih ringan.

d. Pidana Denda

Denda paling sedikit dua puluh lima sen dalam konteks KUHP. Hukuman penjara dapat menggantikan denda jika tidak dibayar. Hukuman alternatif penjara dapat berlangsung dari satu hari hingga enam bulan. kurungan pengganti tidak dapat melebihi delapan bulan dalam hal pemberatan denda karena pelanggaran bersamaan atau berulang.

Pelanggar dapat menjalani pidana pengganti tanpa harus membayar denda. Dengan membayar denda, terpidana dapat dibebaskan dari kurungan alternatif. Terpidana dibebaskan dari bagian kurungan pengganti sebesar bagian yang telah dibayarnya dengan membayar sejumlah uang. bagian dari denda baik sebelum dan sesudah memulainya.²⁷

e. Pidana Tutupan

²⁶ *Ibid.*, Hal 468

²⁷ *Ibid.*, Hal 468-469

Dasar pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah Undang-undang No.20 Tahun 1946 yang mengatur tentang Sanksi Pertanggung jawaban. Pidana Tutupan dimaksudkan untuk orang yang melakukan kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara, tetapi alasan kejahatannya layak untuk dihukum. diperlakukan dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa kejahatan politik adalah target dari hukuman tutupan. Narapidana yang berpartisipasi dalam upaya menutup-nutupi diharuskan bekerja. Demikian pula, kejahatan yang ditutup-tutupi tunduk pada semua peraturan penjara.²⁸

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

penegakan hukum pidana dengan tujuan tertentu. Beberapa tahapan dianggap sebagai upaya atau prosedur rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut tahapannya:²⁹

1. Badan pembuat undang-undang melakukan kegiatan pemungutan suara yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan masa depan pada tahap perumusan, yang merupakan tahap abstrak penegakan hukum pidana. Perundang-undangan terbaik, dalam hal memenuhi persyaratan keadilan dan kegunaan, kemudian harus digunakan untuk merumuskannya. Istilah "tahap kebijakan legislatif" menggambarkan fase ini.

2. Dari kepolisian hingga ke pengadilan, tahapan penegakan hukum pidana yang dikenal dengan "tahap penerapan" disebut "hukum pidana". penegakan

²⁸ *Ibid.*, Hal 470

²⁹ <https://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 09 september 2022 pukul 22:11

hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Tahap yudisial adalah nama yang diberikan untuk tahap ini.³⁰

3. Pelaksana pidana melaksanakan pelaksanaan undang-undang secara konkrit pada tahap eksekusi. Aparat pelaksana pidana kini bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dengan menegakkan tindak pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan saat ini. Akibatnya, peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang kegunaannya menjadi pedoman bagi proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan aparat pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut dipandang sebagai suatu upaya atau prosedur yang terencana, rasional dengan tujuan tertentu. Jelaslah bahwa hal itu harus merupakan mata rantai kegiatan yang terputus-putus yang dimulai dengan nilai-nilai dan pada akhirnya mengarah pada kejahatan dan pemidanaan. hukum untuk mengetahui apa yang sah dan apa yang tidak, perbuatan mana yang dapat dipidana menurut hukum pidana materiil, dan petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengupayakan agar hukum itu berjalan dengan lancar baik sebelum maupun sesudah suatu perbuatan melawan hukum. kepatuhan dengan hukum pidana formil.³¹

B. Uraian Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

³⁰ <https://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 09 september 2022 pukul 22:11

³¹ <https://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html> diakses pada tanggal 09 september 2022 pukul 22:11

Istilah "kejahatan" adalah terjemahan dari "starbaar feit", tetapi buku tentang hukum pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa arti sebenarnya dari starbaar feit. Sebagian besar waktu, kata "kejahatan" berasal dari kata Latin "delictum, " yang berarti "pelanggaran."Starbaar feit adalah istilah hukum Belanda yang terdiri dari kata "starbaar" dan "feit."Sementara "feit" mengacu pada sebagian dari kenyataan,Oleh karena itu, arti harfiah dari "starbaar feit" adalah suatu komponen dari suatu kenyataan yang dapat dijadikan hukum. Kita sadar bahwa yang dapat dipidana adalah orang dan bukan kenyataan, sehingga arti harafiah ini jelas tidak benar.

Setelah istilah "starbaar feit" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Indonesia juga berusaha memberikan pemahaman tentang arti istilah tersebut. Profesor Simon mendefinisikan pidana atau straf sebagai: suatu penyakit yang menurut hukum pidana dihubungkan dengan melanggar suatu peraturan dan diberikan kepada seseorang yang bersalah oleh hakim. Tindak pidana yang telah disesuaikan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali melanggar kekuatan hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.³²

Moeljatno mengganti istilah "tindak pidana" dengan kata "starbaar feit." Menurutnya istilah "tindak pidana" merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. salah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan tujuan komunitas untuk asosiasi komunitas dan membuatnya lebih sulit untuk dilakukan.³³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

³² Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta. (2019). Hal 2

³³ Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Guepedia. Bogor.(2019). Hal 10

Jenis Kejahatan Berbagai kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

2.1 Delik Formil dan Delik Materil

- a. Delik formil adalah rumusan yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang; bukan delik materil. Sebagaimana dinyatakan dalam rumusan delik, perbuatan itu telah mengakhiri delik.
- b. Pelanggaran material adalah pelanggaran yang berfokus pada konsekuensi yang tidak diinginkan (dilarang) dalam formulasinya. Ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi, pelanggaran ini disimpulkan. Jika tidak, paling banyak hanya eksperimen.³⁴

Pelanggaran komisioner, pelanggaran komisi, pelanggaran kelalaian, dan pelanggaran komisi.

2.2 Delik komisi yang berupa pelanggaran larangan, seperti

- a. melakukan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan, disebut delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis per omissionem commissa.
- b. Delik karena kelalaian adalah delik dimana tidak dilakukan sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan, seperti:
- c. delik commissionis per omissionem delik commissa, yang merupakan pelanggaran larangan (dus commissionis delik), tetapi dapat dilakukan dengan tidak mengambil tindakan, dan tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP) keduanya adalah contoh dari hal ini.³⁵

2.3 Delik dolus dan culpa (doleuse en culpose delictim) adalah:

³⁴ Lukman Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Deepublish. Yogyakarta. (2020). Hal 11.

³⁵ *Ibid.*, hal 12

- a. Delik dolusdelik, yang memiliki unsur kesengajaan;
- b. Pelanggaran culpa delik, yang memiliki unsur kelalaian.

2.4 Pelanggaran tunggal dan pelanggaran ganda baru (enkelvoudige en samengestelde delictem):

- a. pelanggaran tunggal adalah salah satu yang dapat dilakukan sekali;
- b. Pelanggaran ganda baru adalah pelanggaran yang dapat dilakukan berkali-kali.

2.5 Pelanggaran berkelanjutan dan delik yang tidak berlangsung lama (juga dikenal sebagai delik berulang dan tidak berkelanjutan) merupakan pelanggaran yang sedang berlangsung dengan karakteristik melanjutkan keadaan yang dilarang.

2.6 (klachtdelicten en niet klachtdelicten) Delik aduan, bukan delik aduan, delik aduan yang hanya dituntut ketika pihak yang terkena (gelaedeerde partij) mengajukan pengaduan.

2.7 Pelanggaran yang bersifat langsung dan berkualifikasi tinggi (eenvoudige en qualified delicten) Pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi.³⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur formal suatu kejahatan disebut sebagai "unsur-unsur kejahatan", dan meliputi:

3.1 Yang dimaksud dengan “perbuatan manusia” secara luas adalah segala sesuatu yang tidak termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia

3.2 .Hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana karena tidak ada kejahatan. Melanggar peraturan

³⁶ *Ibid.*, Hal 13.

pidana berarti bahwa sesuatu akan dihukum jika peraturan pidana sebelumnya telah mengatur tindakan tersebut.

3.3 diancam dengan pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan sifat deliknya, hukuman yang berbeda diatur dalam KUHP.

3.4 Dilakukan oleh pihak yang bersalah, dan unsur kesalahannya adalah sebagai berikut: kesengajaan, keinginan, atau kehendak orang yang melakukan kejahatan itu, disadari atau tidak.

3.5 Orang yang tidak memiliki ingatan yang sehat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Keadaan jiwa seseorang menentukan tanggung jawabnya.

Meskipun perbuatan itu melawan hukum karena unsur materiilnya, tetapi masyarakat harus benar-benar merasakan perbuatan itu sebelum dianggap tidak patut. bertindak jika tidak melawan hukum.³⁷

Simon menyebutkan bahwa suatu kejahatan (*strafbaar feit*) memiliki komponen objektif dan subjektif. ual yang dapat menerima tanggung jawab (*dollus* atau *culpa*) adalah unsur subjektif. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, yang dapat disebabkan oleh akibat dari perbuatan itu atau oleh keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.

Pasal 303 KUHP, misalnya, mendefinisikan perjudian sebagai permainan yang menghasilkan uang secara tidak sah sesuatu yang bahkan ditentang oleh agama sebagai unsur yang melawan hukum.³⁸

³⁷ Rianda Prima Putri. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia. Vol. 1. No 2. (2019). Hal 129-134

³⁸ Ismu gunadu dan jonaedi efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. (2014). Hal 39.

C. Uraian Tentang Perjudian Togel (Toto Gelap)

1. Pengertian Perjudian Togel

Kamus Webster mendefinisikan perjudian (gambling) sebagai aktivitas yang melibatkan beberapa risiko, dan risiko adalah kemungkinan kehilangan uang. Perjudian didefinisikan oleh Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam bukunya *Abnormal Psychology and Modern Life* sebagai "placeting a bet on permainan atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang besar." Uang, barang-barang berharga, makanan, dan barang-barang lain yang dijunjung tinggi dalam suatu komunitas semuanya bisa terancam.

Di Indonesia, salah satu bentuk perjudian adalah togel. Togel adalah singkatan dari kata bahasa Indonesia toto dan gelap. Toto gelap dibuat ketika kedua kata tersebut digabungkan. Togel adalah jenis togel online dan offline dimana pemenangnya memiliki nomor yang sama dengan jumlah yang dibeli. Berjudi dalam lotere melibatkan menempatkan taruhan keuangan berdasarkan prediksi angka yang akan ditarik. Dengan bertaruh uang pada kupon lotre yang berisi nomor yang dapat dipertaruhkan secara melawan hukum, perjudian lotere adalah ilegal. Kemudian, togel offline adalah salah satu di mana pengecer menjual langsung ke audiens yang dituju. Hampir merata di setiap kabupaten, provinsi, desa, dan dusun di Indonesia. Kupon digunakan sebagai bukti transaksi dalam togel offline.

Perjudian memiliki makna pidana dan perdata dalam kerangka hukum banyak negara. Di Indonesia, itu lebih erat dikaitkan dengan makna pidana daripada perdata. Hal ini sesuai dengan No.7 Tahun 1974, Pasal 1 yang

menyatakan, " semua pelanggaran taruhan adalah kesalahan". Oleh karena itu, perjudian sesuai dengan Undang-undang jelas dilarang.³⁹

Tentang delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis disebutkan sebagai berikut:

Bagian 303:

1. Tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan yang berharga untuk permainan taruhan dan menjadikannya sebuah misi, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam suatu organisasi karena alasan itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan kepada publik kesempatan untuk berjudi atau berpartisipasi dalam bisnis untuk tujuan itu, terlepas dari apakah kesempatan itu diambil atau tidak, dengan tunduk pada kondisi tertentu dan kepatuhan terhadap prosedur tertentu.
 - 3) Terlibat dalam aktivitas perjudian seperti pencarian.
2. Haknya untuk melakukan pengeledahan dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan pengeledahan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
3. Permainan apa pun yang disebut sebagai "permainan judi" adalah permainan yang hasilnya, dalam banyak kasus, ditentukan secara kebetulan daripada keterampilan atau pelatihan. Ini mencakup semua taruhan lain serta semua taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain antara mereka yang berpartisipasi atau bermain."

Bagian 303 bis:

1. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sepuluh juta rupiah;
 - 1) Setiap orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi dengan melanggar Pasal 303.
 - 2) Setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat umum tanpa izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberikan izin untuk berjudi di sana.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu sudah lewat dua tahun sejak pidana itu menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut.

³⁹ Syamsuddin, Aziz. *Deskriminalisasi Tindak Pidana Perjudian: Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil Dan Makmur*. Gava Media. Jakarta. (2007). Hal.

Perjudian didefinisikan oleh KUHP sebagai permainan apa pun di mana kemungkinan menang biasanya ditentukan semata-mata oleh keberuntungan. Dengan kata lain, "perjudian" mengacu pada setiap dan semua taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak ditempatkan oleh mereka yang sedang bertanding atau memainkannya. Penjelasan hukumnya masih menggunakan definisi perjudian yang cukup luas sebagai kegiatan spekulatif tetapi mempertimbangkan analisis data yang rasional.

Seperti yang dapat dilihat di atas, perjudian adalah kejahatan, dan karena itu adalah kejahatan, semua pihak harus bekerja sama untuk memerangi dan memberantas semua masalah yang terkait dengan perjudian.⁴⁰

2. Struktur Perjudian Togel (Totoan Gelap)

Orang-orang yang menjadi bagian dari jaringan perjudian togel tidak hanya berjudi, tetapi mereka juga berperan dengan posisi atau posisinya masing-masing. Bawahan dan atasan berbeda. Dealer, backing/security, pengecer nomor lotre, pengumpul nomor lotre, dan pembeli lotre (pemain atau penjudi) termasuk di antara mereka. Orang-orang yang berada di organisasi taruhan togel ini juga memiliki kewajiban khusus mereka termasuk:

2.1 Penyalur adalah penanggung jawab jaringan perjudian togel di suatu wilayah tertentu. Mungkin ada lebih dari satu nomor. Penyalur regional ini berinteraksi langsung dengan bandar utama yang mengendalikan sistem perjudian togel ketika mereka bermain judi togel. Penyalur memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perjudian lotere terus berlanjut. Dia mengawasi kelancaran kegiatan perjudian lotre selain memimpin dan

⁴⁰ Syamsuddin, Aziz., *Op. Cit.*

menjual perjudian lotre kepada masyarakat umum. Jaminan keamanan untuk kelompok perjudian yang dipimpinnya — investor — serta back-in /pencari keamanan untuk menjaga aktivitas perjudian lotere dan karyawannya merupakan bentuk tanggung jawab ini.

2.2 Backing/Security adalah bawahan yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan perjudian togel. Ada juga oknum aparat keamanan dan pemerintah serta sekelompok anak muda yang bertugas memastikan keamanan lotere internal. Mereka mendapatkan jatah keamanan dari Bandar langsung.

2.3 Salah satu bawahan Bandar adalah Kolektor yang tugasnya mengumpulkan simpanan dari penjual togel atau pengecer. Pengumpul hanya perlu memperoleh nomor setoran dan uang dari penjualan pengecer nomor judi togel sebelum menyetorkannya ke Bandar, membuat tugas menjadi mudah. 15% hingga 20% dari penjualan lotere digunakan untuk komisi yang dibayarkan dealer kepada kolektor untuk mengumpulkan kupon.

2.4 Pengecer/penjual, yang tanggung jawabnya berada di bawah tanggung jawab pengumpul dalam hal ini Beberapa dari mereka adalah bawahan Bandar dan bertugas menjual nomor lotre pembeli. Selain menjual nomor, pengecer bertanggung jawab untuk menulis ulang nomor penjudi di atas kertas dan menyetorkan nomor rekap dan uang kepada kolektor. Setiap kali lotere dimainkan, dealer atau kolektor dibayar komisi sebesar 10% dari hasil penjualan.

2.5 Orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan jumlah uang yang diinginkan disebut pemain atau penjudi. Para informan menyatakan bahwa kelompok judi togel seluruhnya terdiri dari penjudi. Semuanya pasti judi, termasuk bandar sendiri, kolektor, pengecer, dan bahkan dukungan atau keamanan.

Mengingat dealer, backing/security, pengumpul nomor togel, pengecer nomor togel, dan pembeli togel adalah bagian dari jaringan judi togel, penulis menyimpulkan bahwa jaringan judi togel ini adalah organisasi informal yang terorganisir dan terstruktur yang dibangun atas dasar kerjasama..

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Togel

Agar suatu tindakan dianggap perjudian, tiga kondisi harus dipenuhi:

3.1 Balapan atau permainan Permainan biasanya berupa kompetisi atau permainan. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk hiburan atau untuk menghibur hati selama waktu luang. Jadi pada dasarnya itu adalah olahraga, tetapi di sini para penghibur tidak perlu terlibat dalam permainan, karena mereka bisa menjadi pengamat atau individu yang ikut serta dalam bertaruh selama pertandingan atau pertandingan.⁴¹

3.2 Semoga beruntung Untuk mendominasi suatu perlombaan atau pertandingan, lebih bergantung pada unsur kejadian atau karma spekulatif/kebetulan, atau variabel kemenangan yang didapat karena kecenderungan atau wawasan pemain yang sangat terbiasa atau siap.⁴²

⁴¹ Waney, Gerald. Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 Bis Kuhp). Lex Crimen Vol.5. No.3. (2016). Hal 32

⁴² *Ibid.*, Hal 32

3.3 Taruhan dibuat dalam permainan, kompetisi, atau balapan ini. Taruhan dilakukan oleh pemain atau dealer dalam bentuk uang atau properti lainnya, dan bahkan istri adalah taruhan. Pasti akan ada pemenang dan pecundang sebagai akibat dari taruhan ini. Aspek paling penting dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perjudian apakah ini.

Unsur perjudian togel sama dengan ketentuan Pasal 303 KUHP karena yang terjadi di masyarakat:

- a. tindakan menggunakan kupon putih berisi nomor.
- b. Bergantung pada angka yang dipertaruhkan pada kupon putih
- c. ini berisiko. Perjudian lotere melibatkan penempatan taruhan pada barang atau uang.
- d. Judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang mengatur tentang perjudian.

Sementara itu, KUHP membagi perjudian menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 303 KUHP, tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp100.000.25.000,00,- (25 juta rupiah) kepada siapa saja tanpa izin terlebih dahulu.

(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan peluang potensial untuk permainan taruhan akan membuatnya berhasil, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam bisnis.

(2) Dengan sengaja berpartisipasi dalam bisnis, terlepas dari apakah akan memanfaatkan peluang, ada kondisi atau penyelesaian prosedur, atau menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi;

(3) Terlibat dalam aktivitas perjudian seperti pencarian.

2) Hak untuk melakukan pengeledahan dapat dicabut jika yang bersalah melakukan tindak pidana pada saat melakukan pengeledahan.

3) Permainan yang dianggap perjudian adalah permainan apa pun yang secara umum kemungkinan menghasilkan keuntungan tergantung pada keberuntungan murni, selain fakta bahwa permainan itu lebih terampil atau mahir. taruhan, ada permainan tambahan yang tidak dimainkan antara peserta dalam kompetisi atau bermain.⁴³

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP, ayat (1) memuat lima delik terkait perjudian:

1. Pertama, ada dua pelanggaran. Poin kedua, ada tiga pelanggaran. Ketiga, hanya ada satu jenis kejahatan.

Namun, dasar pemberatan pidana dapat ditemukan dalam Pasal (2), dan pengertian perjudian dalam Pasal (1) dapat ditemukan dalam Pasal (3).

Ada unsur ilegal atau melawan hukum yang melekat dalam lima kejahatan tersebut di atas yang hadir dalam unsur-unsur tanpa izin..

(1) Pelanggaran Pertama Pelanggaran ini disebutkan dalam poin pertama, yang mengatakan bahwa adalah ilegal untuk dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya bisnis.

Unsur-unsur kejahatan ini, berdasarkan uraian;

Unsur objektif:

- a. Apa yang dilakukannya; Memberi kesempatan atau kesempatan
- b. Tujuan; berjudi tanpa izin
- c. Dipekerjakan sebagai sarana penghidupan

Unsur subjektif:

Pelaku delik pertama ini tidak berjudi. Perjudian tidak dilarang dalam kejahatan ini, tetapi tindakan berikut adalah:

- a. sebuah. Memberikan kesempatan untuk berjudi

⁴³ *Ibid.* hal 33

- b. Memberikan peluang untuk berjudi Dalam konteks ini, "menawarkan peluang" mengacu pada pembuat yang menyediakan lokasi atau waktu tertentu dan mengundang orang lain untuk berjudi. Dalam contoh khusus ini, tidak ada yang berjudi.⁴⁴

(2) Pelanggaran Kedua Pelanggaran kedua dijelaskan dalam poin 1, dan melibatkan partisipasi dalam aktivitas permainan judi tanpa izin dan dengan niat. Akibatnya, terdiri dari komponen berikut:

Unsur objektif:

- a. sebuah. Tata cara: ikut serta dalam acara tersebut.
- b. Tujuan: dalam kegiatan bisnis yang melibatkan permainan judi ilegal.

Perbuatan ikut serta atau terlibat dalam kegiatan perjudian merupakan jenis kejahatan perjudian yang kedua.

Unsur subjektif

- a. Kejahatan kedua juga memiliki beberapa kesengajaan, namun kesengajaan ini lebih mengarah pada unsur perjudian, artinya pelaku juga ikut serta dalam kegiatan permainan judi. Seperti kejahatan pertama, kejahatan ini juga memiliki beberapa kesengajaan.
- b. Berlawanan dengan kejahatan pertama, di mana pelaku tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian.

(3) Jenis kejahatan perjudian yang ketiga adalah perjudian tanpa izin dengan maksud untuk menawarkan atau memfasilitasi peluang perjudian bagi masyarakat umum. Berikut adalah komponen-komponennya:

Unsur Obyektif

⁴⁴ *Ibid.*, Halm. 33-34

- a. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum
- b. Dengan niat terlibat dalam perjudian ilegal.

Unsur subjektif

- a. Dengan tujuan tertentu

Kejahatan jenis ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan jenis pertama. Seperti yang diketahui umum, persamaannya adalah dalam tindakan, khususnya dengan menawarkan atau memberikan peluang perjudian.⁴⁵

Berbeda dengan kejahatan ketiga, dimana perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan dikatakan untuk umum, bentuk kejahatan pertama tidak menentukan untuk siapa kejahatan itu ditujukan. Jenis kejahatan pertama juga berbeda dalam hal kejahatan yang pertama. pelaku menggunakan judi sebagai sarana untuk mencari nafkah, sedangkan jenis kejahatan ketiga tidak memiliki unsur penghidupan.

- (4) Tindak pidana keempat, berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP, melarang dengan sengaja ikut serta dalam kegiatan usaha perjudian yang tidak sah.

Unsur-unsur ini membentuk jenis keempat kejahatan perjudian:

Unsur objektif

- a. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan perjudian Kegiatan usaha perjudian ilegal

Unsur Subyektif

- a. Sengaja Jenis kejahatan perjudian yang keempat ini memiliki kriteria yang hampir sama dengan jenis kejahatan perjudian yang kedua; namun unsur penyertaanlah yang membedakan keduanya. Unsur penyertaan pada jenis

⁴⁵ *Ibid*, Hal 34

kedua tindak pidana perjudian dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha perjudian, sedangkan unsur penyertaan pada jenis keempat tidak dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha perjudian.

- (5) Bentuk kejahatan perjudian yang kelima juga termasuk partisipasi, tetapi partisipasi tidak lagi melibatkan pemberian kesempatan untuk berjudi, melainkan berpartisipasi dalam permainan itu sendiri.

Pasal 303 KUHP rusak jika memanfaatkan kesempatan untuk berjudi.

Perjudian di atas diatur oleh Pasal 303 bis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah; Pertama, penjudi yang memanfaatkan kesempatan yang diatur dalam Pasal 3030 Kedua, setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum atau di tempat terbuka untuk umum, kecuali jika pejabat yang bertanggung jawab telah memberikan izin untuk aktivitas perjudian tersebut.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, jika pada waktu melakukan kejahatan itu sudah lewat dua tahun sejak pemidanaan sebelumnya yang menjadi tetap karena salah satu kejahatan itu.⁴⁶

D. Uraian tentang Kabupaten Batu Bara

Luas wilayah Kabupaten Batu Bara adalah 904,96 km², dengan sebagian besar terletak di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil di Pulau Pandan dan Pulau Salah Nama. Secara astronomis, Kabupaten Batu Bara terletak antara 99005' dan 99039' Bujur Timur dan 2046' dan 3026' LU.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Asahan : d.
berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai Wilayah Kabupaten Batu Bara yang berbatasan dengan Selat Malaka dan memiliki ketinggian 0-80 meter di atas

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.35

permukaan laut, memiliki topografi yang relatif datar dan landai. Daerah sedimen ini dikenal sebagai daerah dataran rendah yang relatif datar di atas permukaan laut. pesisir pulau Sumatera (Sumatera Utara). Seluruh wilayah utara dibatasi oleh Selat Malaka, dan pantai di sini panjangnya kurang dari 110 kilometer. Kawasan ini sangat ideal untuk digunakan sebagai lingkungan perumahan, perkebunan, pertanian persawahan, bisnis, industri, dan pusat layanan, dan banyak lagi. Kondisi iklim di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh lokasinya. Iklim juga akan berdampak pada fauna dan flora setempat. Mirip dengan iklim Indonesia pada umumnya, Kabupaten Batu Bara memiliki iklim tropis dengan suhu tinggi dan suhu udara yang tinggi di seluruh wilayah. tahun, berkisar antara 230 hingga 270 derajat Celcius. Ada dua musim: musim hujan dan musim kemarau. September hingga Maret adalah musim hujan, dan Maret hingga September adalah musim kemarau. Musim peralihan terjadi antara bulan Maret dan September. Tingkat curah hujan tahunan adalah 1.702 mm.⁴⁷

Ada tujuh kecamatan di Kabupaten Batubara. Kabupaten Lima Puluh memiliki luas wilayah 239,55 km² atau sekitar 26,47 persen dari total luas wilayah batubara. Kecamatan Tanjung Tiram memiliki luas 173,79 km² atau sekitar 19,20 persen, dan Kecamatan Sei Suka memiliki luas 171,47 km² atau 18,95 persen. Sedangkan Kecamatan Medang Deras memiliki luas terkecil 65,47 km², atau sekitar 7,24 persen dari luas wilayah Batu Bara.⁴⁸

⁴⁷ <https://www.batubarakab.go.id/pages/selayangpandang#:~:text=Kabupaten%20BatuBara%20merupakan%20hasil%20pemekaran,km%20selatan%20ibu%20kota%20Medan> diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 22:30

⁴⁸ <https://www.batubarakab.go.id/pages/selayangpandang#:~:text=Kabupaten%20BatuBara%20merupakan%20hasil%20pemekaran,km%20selatan%20ibu%20kota%20Medan> diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 22:30

Dari perkiraan populasi 400.803 pada tahun 2015 menjadi 404.988 pada tahun 2016, Kabupaten Batubara telah mengalami peningkatan populasinya. Ada 203.689 laki-laki dan 201.299 perempuan dalam populasi terbesar. Dengan rasio jenis kelamin 101, laki-laki merupakan mayoritas. dari jumlah penduduk Kabupaten Batubara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 perempuan di Kabupaten Nias terdapat 101 laki-laki. Kabupaten Lima Puluh memiliki penduduk terbanyak yaitu 90.667 jiwa, dan Kecamatan Sei Balai paling sedikit yaitu 28.038 jiwa.

Kecamatan Medang Deras memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 811,20 jiwa per kilometer persegi atau 811 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sei Balai dengan kepadatan penduduk 302,66 jiwa. atau 303 orang per kilometer persegi.

Dengan proporsi jenis kelamin sebesar 105, Kecamatan Tanjung Tiram merupakan wilayah dengan proporsi jenis kelamin yang paling tinggi yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Sebaliknya, Kecamatan Air Putih memiliki rasio jenis kelamin terendah. , dengan 98 penduduk laki-laki dan 100 penduduk perempuan di wilayah tersebut. Kecamatan Medang Deras mengalami pertumbuhan penduduk terbesar, yaitu 1,64 persen. Sebaliknya, Kabupaten Sei Balai memiliki tingkat pertumbuhan penduduk terendah, yaitu 0,69 persen. Kabupaten, wilayah dengan penduduk terbanyak, juga memiliki rumah tangga terbanyak, menurut jumlah rumah tangga. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk terendah, Kecamatan Sei Balai, memiliki rumah tangga paling sedikit.

Penduduk Kabupaten Batubara pada tahun 2015 yang bekerja sebanyak 155.514 orang, dengan rincian 145.679 orang bekerja dan 9.835 orang diantaranya menganggur. Pada tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Batubara sebesar 57,72 persen. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia di atas 15 tahun, sekitar 57 tersedia untuk memproduksi barang dan jasa selama pasokan tenaga kerja tinggi. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka rendah, yaitu 6,32 persen.⁴⁹.



⁴⁹<https://www.batubarakab.go.id/pages/selayangpandang#:~:text=Kabupaten%20BatuBara%20merupakan%20hasil%20pemekaran,km%20selatan%20ibu%20kota%20Medan> diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 22:30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu untuk penelitian akan ditentukan setelah seminar garis besar untuk tesis direvisi dan dilakukan.

Berikut timeline penelitiannya:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2021				Februari 2022				Mei 2022				Juli 2022					Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polres Batu Bara Jln. Lima Puluh Kota, Kec.

Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara 21255

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel di Kabupaten Batu Bara (Studi di Polsek Batu Bara) termasuk dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka untuk melakukan penelitian normatif.

Dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan merupakan contoh data sekunder. Bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan, merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk tujuan hukum primer tersebut. materi dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dapat berupa:

- a. Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, makalah, dan sumber lain dapat digunakan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.⁵⁰

⁵⁰ Jonaedi efendi., Dan jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana. Jakarta.* (2018). Hal 153

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada baik fenomena alam maupun fenomena buatan. Penelitian ini merupakan hakikat penelitian. Bentuk, kegiatan, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya merupakan fenomena yang dimaksud.⁵¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian data meliputi:

- a. Sebuah penelitian yang disebut penelitian kepustakaan menggunakan sumber bacaan seperti undang-undang, buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pokok bahasan proposal. Penulisan ini menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian lapangan (field research), khusus mendukung analisis dengan penelitian lapangan langsung. Dalam hal ini penulis langsung melakukan investigasi ke Polres Batu Bara untuk mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara dengan Bpk. Aipda Ahmad Edi Sahputra, Bareskrim Ops Baurbin Polres Polres Batu Bara, terkait tindak pidana perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Batu Bara.

4. Analisis Data

Penulis melakukan analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang diperolehnya sebelum disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,

⁵¹ Nana Syaodih sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Bandung.* (2011). Hal .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari hasil penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya:

1. Perilaku pemain judi togel menunjukkan dampak judi togel terhadap warga Kabupaten Batu Bara; Dalam hal ini, penjudi togel akan mengembangkan kecanduan judi yang parah. Orang-orang sangat terpacu pada umpan untuk menjadi kaya dengan mempertaruhkan berbagai harta yang signifikan tanpa memikirkan hasil yang akan diperoleh, ini membuka jalan bagi tindakan pelanggaran hukum lainnya untuk terjadi. Di mana pemain lotere membenarkan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk bermain.
2. Bisa saja unsur-unsur yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan judi togel ini. Faktor Eksternal pertama semuanya berada di luar diri pelaku judi togel, yaitu sebagai berikut: dalam judi togel, dan faktor ekonomi justru menjadi penyebab utama kejahatan judi togel. Karena judi togel memiliki omzet yang begitu menjanjikan, bahkan judi togel digunakan sebagai sarana mencari uang untuk menafkahi keluarganya sehari-hari. Pembentukan karakter dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan seseorang, yang meliputi norma-norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial mereka, serta faktor-faktor lain yang dapat ditemui orang. Kategori faktor kedua dikenal sebagai faktor internal, dan itu termasuk berikut ini: Faktor Kesenangan Dalam hal ini, kesenangan

menjadi motivasi utama bagi banyak orang untuk memasuki industri perjudian tidak lain untuk bersenang-senang. Dengan membuat orang penasaran ab keluar judi togel dan tebak angka rahasia, game ini membangunkan para penjudi togel. Faktor-faktor yang berhubungan dengan agama Mayoritas orang memiliki iman yang goyah atau hampir hilang, dan bahkan pengalaman nilai-nilai agama sangat rendah di zaman sekarang ini. Religius orang sering terlibat dalam tindakan yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Banyak dari tindakan ini bersifat kompulsif, ekstensif, dan memberikan peluang untuk melakukan kejahatan.

3. Penegakan hukum preventif (pencegahan). Dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, Polres Batu Bara telah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu upaya tersebut adalah patroli rutin dan terarah yang dilakukan oleh masing-masing polsek. membentuk tim khusus untuk mengintai lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat perjudian togel (informan). Penyuluhan kepada klien tentang risiko perjudian togel dalam membina keyakinan agama setiap orang .Kebijakan pemerintah yang represif Tindakan represif diperlukan oleh polisi untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan, dalam hal ini judi togel, setelah Polres Batu Bara melakukan tindakan pencegahan, namun judi togel masih marak. Pasal 121 mengatur syarat-syarat pembentukan pejabat tersebut. laporan..

B. SARAN

Penulis telah mengembangkan beberapa rekomendasi berdasarkan temuan penelitian lapangan mereka, khususnya:

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara lebih memperhatikan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batu Bara adalah faktor ekonomi.
2. Diharapkan aparat Polres Batu Bara secara rutin melakukan tindakan preventif untuk mengakhiri perjudian togel, khususnya dengan melakukan razia besar-besaran. Polisi perlu dilibatkan dalam semua aspek penegakan hukum, tidak hanya masyarakat.
3. bagi orang-orang untuk menahan diri dari berjudi lotere karena hal itu akan semakin menyebabkan keadaan yang lebih sulit. Selain itu, hukum Indonesia melarang hal ini, dan itu bertentangan dengan prinsip agama dan moral..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arliman S, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*.

Yogyakarta: Deepublish

Arliman, Laurensius. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*.

Yogyakarta: Deepublish

Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor:

Guepedia.

Burlian, Paison. 2016. *Patologi Social: Perspektif Sosiologi Yuridis Dan Filosof*.

Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Efendi, Jonaedi., Dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif*

Dan Empiris. Jakarta: Kencana

Gunadi, Ismu., Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Jakarta: Kencana.

Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*.

Yogyakarta: Deepublish.

Hiarej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Imaniyati, Neni Sri, Dan Panji Adam. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartono, Kartini, 2001. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Situmorang Helmi, Syafrizal. 2010. *Analisis Data*. Medan: Usu Press.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syamsuddin, Aziz. 2007. *Deskriminalisasi Tindak Pidana Perjudian: Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil Dan Makmur*. Jakarta: Gava Media.

Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish

Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Tentang Penertiban Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Jurnal, Skripsi, Website.

Jurnal

Amalia, Rike, Henna Muchtar, Dan Muhammad Prima Ersya. 2019. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang*. Journal Of Civic Education. 2 (1).

Arif, Muhammad. *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. Jurnal Hukum. 2021.13 (1).

Gobuino, Septiana Erika.(2015). *Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, 24(2).

Gunawan,Tri.& Andriado, Ifan. (2021). *Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi “Togel” : Studi Kasus Masyarakat Desa Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, KabupatenMalang*, 5(1).

Hamdan. 2014. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar*. Journal article.Vol 1. No 2.

Harefa, Safaruddin. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.Jurnal Hukum. 4(1).

Isnaini, Enik. 2018. *Tinjauan Yuridis Normative Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Independent. 5(1).

- Kenedi, Jhon. 2014. *Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*. 3 (1).
- Ompu Jainah, Zainab. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Journal Of Rural And Development*. 3(2).
- Putra, Anak Agung Gde Krisnanta, Dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2022. *Kajian yuridis terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (togel)*. jurnal kertha semaya. 10.
- Putri, Rianda Prima. 2019. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia. 1(2).
- Rindengan,Rivana Noviana, Ferdianand Kerebungu, Dan Zoni Hengki Singal. 2020. *Dampak Judi Togel Terhadap Masyarakat Di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Sosiologi. 1(1).
- Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum*. 8(3).
- Waney, Geraldy. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303,303 Bis Kuhp)*. Lex Crimen. 5(3).
- Widhiantara, ketut adi. Wayan suardana. *Upaya hukum penanggulangan tindak pidana perjudian togel oleh kepolisian di Polresta Denpasar*. Jurnal ilmu hukum. 2013. 3 (1).

Skripsi

- Azania, Ayu, Mircahya, Intan, 2013. *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*. Journal, Surabaya : Antopologi FISIP-UNAIR.

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-it4e8ec99e4d2ae> Diakses Tanggal 7 Juli 2022 Pukul 9:15

<https://pdblawfirm.id/alatbuktidalamhukumacaraDiIndonesia/#~:Text=Menurut%20m.%20yahya%20harahap%20dalam,penilaian%20hakim%20di%20dalam%20pengadilan> Diakses Tanggal 7 Juli 2022 Pukul 9:27.

<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> Diakses Tanggal 7 Juli 2022 Pukul 10:54

<http://eprints.unm.ac.id/11807/> Di Akses Pada Tanggal 03 April 2022, Jam 16:50 WIB

<http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-berjudi-bentuk-bentuk-judi.html> Yang Diakses Pada 01 Maret 2022 11:48 WIB

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aipda Ahmad Edi Sahputra selaku BAURBIN OPS RESKRIM Kepolisian Resor Batu Bara.

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sei Mentaram.

**HASIL WAWANCARA DI KANTOR POLISI RESOR BATU BARA TERKAIT SKRIPSI
YANG BERJUDUL “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
TOGEL DI KABUPATEN BATU BARA (STUDI DI KEPOLISIAN REOR BATU
BARA)”**

NAMA : AIPDA AHMAD EDI SAHPUTRA

JABATAN : BAURBIN OPS RESKRIM

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Apakah yang menjadi faktor terjadi perjudian togel dikalangan masyarakat kab. Batu bara?

Jawaban: yang menjadi faktornya itu ada dua macam yang pertama itu faktor ekonomi, para pelaku sering memberikan alasan bahwa mereka melakukannya karena financial yang kurang bagus, mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan jadi mereka melakukan perjudian togel. kalau faktor lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang, seperti yang kita ketahui manusia itu cenderung ikut-ikutan dengan apa yang sedang ramai dilingkungannya.

2. Apakah judi togel di batu bara termasuk masalah yang serius?

Jawaban: judi togel di kabupaten batu bara jika diliat kasusnya setiap tahunnya tidak terlalu serius.

3. Bagaimana pengaturan tentang judi togel di Indonesia?

Jawaban: pengaturan tentang judi togel di atur dalam KUHPidana pasal 303 dan 303 bis.

4. Daerah mana yang sering dilakukan penangkapan pelaku judi togel di kabupaten batu bara?

Jawaban: daerah yang rawan malakukan perjudian togel sei balai dan indrapura

5. Apakah bapak pernah melakukan penangkapan kegiatan terlarang tersebut dalam kelas besar?

Jawaban: kami belum pernah meringkus Bandar judi togel, karena jika kami mendapat informasinya dari pengepul, bandarnya ini sudah langsung kabur dan menghapus semua kontak termasuk kepada pengepul yang kami tangkap.

6. Apa saja bukti yang bapak sita waktu peristiwa penangkapan pelaku judi togel?

Jawaban: yang menjadi barang bukti biasanya pulpen, bloc penulisan, handphone dan orangnya.

7. Kebanyakan peristiwa judi togel yang berhasil diringkus, apakah hasil penyelidikan polisi atau dari laporan masyarakat?

Jawaban: paling sering hasil penyelidikan, masyarakat jarang melapor.

8. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polres batu bara
Jawaban:

Salah satu Upaya penanggulangan tindak pidana judi togel dengan hukum pidana (sarana penal) yang lebih menitik beratkan pada sifat Represif, ketika tindak pidana telah terjadi.

Adapun tindakan represif yang dilakukan kepolisian adalah Penyelidikan dan penyidikan.

9. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor batu bara?

Jawaban:

1. Melaksanakan patroli yang dilakukan oleh setiap polsek secara terarah dan teratur.

2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel (informan).
 3. Melakukan Penyuluhan Tentang Bahaya Judi Togel
 4. Memperkuat Keyakinan Agama Bagi Setiap Individu
10. Apa yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel?

Jawaban: kurangnya personil kepolisian di resor batu bara, jaringan sindikat terorganisasi, adanya oknum yang melindungi peredaran tindak pidana judi togel.

11. Bagaimana dampak judi togel bagi masyarakat batu bara?

Jawaban : masyarakat miskin semakin terjebak dalam masalah ekonomi, Terjadi tindak kriminal lain, dan membuat masyarakat miskin terlilit utang.

12. Berapa data kejahatan tindak pidana judi togel di kabupaten batu bara mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022?

Jawaban:

Tahun	2019	2020	2021	2022
Kasus	4	6	5	3

Narasumber



(AIPDA AHMAD AHMAD EDI SAHPUTRA)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/22

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)**

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pukul 15.20 Wib, oleh saya :

R H TAMBUNAN, SH MH

Pangkat IPDA NRP 87070141 Jabatan Penyidik (Kanit I Resum) pada Kantor tersebut diatas, bersama sama dengan

HANRISAL SILAEN SH

Pangkat BRIPTU Nrp 93010449, selaku Penyidik Pembantu pada kantor yang sama telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama :

PARLIN SILALAH

Umur 27 Tahun, Lahir di MEKAR MULIO, Tanggal 04 September 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pekerjaan Polri, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Aspol Polres Batu Bara.

lanya (**PARLIN SILALAH**) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **SAKSI** dalam perkara tindak pidana Perjudian (jenis togel), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dari K.U.H.Pidana Subs 303 Bis dari KUHPidana dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 183 / III / 2022 / SU / Res. Batu Bara, tanggal 15 Maret 2022.

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Pemeriksa, yang diperiksa menerangkan dan menjelaskan sebagai berikut di bawah ini :

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Apakah Saudara sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ? Serta bersediakah Saudara diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ?
— 01. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
02. Mengertikah Saudara apa sebabnya Saudara diminta keterangan pada saat sekarang ini ? Jika mengerti sehubungan dengan hal apa saudara diperiksa dan diminta keterangan pada saat sekarang ini ?
— 02. Ya, saya mengerti sebabnya diminta keterangan pada saat sekarang ini, yaitu sehubungan dengan diamankannya seorang Laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel dengan merekap angka pasangan togel, yang mana yang melakukan penangkapan tersebut adalah saya sendiri bersama dengan teman saya yang bernama **ANDI SYAHPUTRA** dan **ALI AKBAR**.
03. Jika demikian, kapan dan dimanakah Saudara bersama dengan **ANDI SYAHPUTRA** dan **ALI AKBAR** melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang melakukan judi jenis togel dengan merekap angka pasangan togel tersebut ?
— 03. Saya bersama dengan teman saya yang bernama **ANDI SYAHPUTRA** dan **ALI AKBAR** melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel dengan merekap angka pasangan togel tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sumber Makmur Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Di Warung Bernama.
04. Siapa nama laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel dengan merekap angka pasangan togel yang Saudara tangkap bersama dengan **ANDI SYAHPUTRA** dan **ALI AKBAR** tersebut ?

04. Sebelumnya saya belum mengetahui nama Laki-laki yang melakukan permainan judi jenis togel tersebut, namun setelah saya menginterogasinya, Laki-laki tersebut mengaku bernama HUMINCA SIAHAAN, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dsn I kampung pompa Perlanakan Kec Bandar Kab Simalungun.
05. Permainan judi apakah yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN pada saat Saudara Melakukan Penangkapan bersama ANDI SYAHPUTRA dan ALI AKBAR tersebut? barang-baru apa saja yang ditemukan pada saat saudara mengamankan HUMINCA SIAHAAN yang ada hubungannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut? jelaskan
05. Permainan judi yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN sewaktu saya tangkap bersama dengan teman saya adalah judi jenis togel, dan barang bukti yang ditemukan pada HUMINCA SIAHAAN yang ada hubungannya dengan permainan judi yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN yaitu:
- Satu unit handphone Samsung Warna Hitam Type A035
 - Satu unit handphone Nokia berwarna biru
 - Uang Sejumlah Rp 700.000 (tuju ratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) buah pulpen
06. Sedang melakukan aktifitas apakah HUMINCA SIAHAAN pada saat Saudara bersama dengan ANDI SYAHPUTRA dan ALI AKBAR melakukan penangkapan terhadap HUMINCA SIAHAAN di Desa Sumber Makmur Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Di Warung Tukang Lontong tersebut?
06. Dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya bersama dengan teman saya melakukan penangkapan terhadap HUMINCA SIAHAAN di Desa Sumber Makmur Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Di Warung Tukang Lontong tersebut adalah pada saat ia berada di samping warung tersebut di atas sepeda motor sedang menggunakan Handphone miliknya
07. Dengan cara bagaimanakah HUMINCA SIAHAAN melakukan permainan judi jenis togel tersebut? Dan siapa bandar judi jenis togel yang dilakukan oleh terhadap HUMINCA SIAHAAN tersebut? Jelaskan
07. Adapun caranya HUMINCA SIAHAAN melakan permainan jenis togel tersebut di Desa Sumber Makmur Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Di Warung Tukang Lontong tersebut dengan cara pada saat HUMINCA SIAHAAN sedang berada di samping warung tersebut saya melihat HUMINCA SIAHAAN sedang menerima pesanan Padangan Nomor Togel dan pada saat di lakukan penangkapan di handphone HUMINCA SIAHAAN terdapat nomor tebakan pasangan yang togel dan pada saat di lakukan wawancara saudara HUMINCA SIAHAAN mengakui perbuatannya sebagai penerima / penulis nomor tebakan togel yang mena saudara HUMINCA SIAHAAN mengakui mengirim nomor tebakan tersebut kepada laki laki Bernama WAK MIN, (nama panggilan) Lk 60 tahun Islam Wiraswasata Pasar I Jalan Perdagangan III Kec Bandar Kab Simalungun
08. Apa maksud dan tujuan HUMINCA SIAHAAN melakukan permainan judi jenis togel tersebut? Dan setiap hari apa saja HUMINCA SIAHAAN merekap serta menerima pesanan nomor angka tebakan judi tersebut? Dan pukul berapakah putaran nomor tebakan jenis togel tersebut dikeluarkan? Dan apakah nomor angka tebakan togel tersebut mendapatkan hadiah? Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan hadiahnya?
08. Maksud dan tujuan HUMINCA SIAHAAN melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau menambah mata pencaharian berupa upah penjualan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang hasil penjualan nomor angka tebakan tersebut, dan HUMINCA SIAHAAN menerima pesanan nomor angka tebakan togel tersebut adalah setiap harinya dimana pemutaran judi jenis togel tersebut dikeluarkan setiap siang yaitu sekira pukul 14.00 Wib, dan ada mendapatkan hadiah, yaitu apabila nomor angka tebakan yang dibeli atau dipesan oleh si pembeli sesuai dengan nomor angka yang telah dikeluarkan pihak bandar sehingga si pembeli berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang hadiahnya bervariasi sesuai dengan pembelian.

Bersambung ke hal...03

09

Berapa harga pembelian nomor angka tebakan togel yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut ? Dan bagaimana bentuk nomor angka tebakan yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut ? Dan sejak kapan HUMINCA SIAHAAN merekap sekaligus menerima pesanan nomor angka tebakan togel tersebut ? Dan berapa hasil penjualan HUMINCA SIAHAAN sewaktu dilakukan penangkapan ?

09. Harga nomor angka tebakan togel yang dijual oleh HUMINCA SIAHAAN kepada pembeli atau pemasang yaitu uang taruhannya paling rendah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan pasangan tertinggi tak terbatas dan pemasang wajib menebak 2 (dua) angka paling rendah dan paling banyak 4 (empat) angka dan menurut keterangan dari HUMINCA SIAHAAN bahwa ianya menjual dan menulis nomor angka tebakan togel kurang lebih sudah 3 (tiga) Bulan dengan yang sekarang ini tertangkap di Polres Batu Bara, dan hasil penjualan HUMINCA SIAHAAN pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pasangan togel hari ini saudara HUMINCA SIAHAAN mengakui berjumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pasangan hari sebelumnya di gunakan untuk makan dan minum, menurut pengakuan HUMINCA SIAHAAN kepada kami pada saat kami sedang melakukan wawancara kepadanya pada saat di lakukan penangkapan-

10. Darimana HUMINCA SIAHAAN mengetahui bahwa nomor angka tebakan togel yang dikeluarkan oleh pihak bandar untuk mendapatkan hadiah oleh pembeli atau pemasang nomor angka tebakan togel tersebut ? Dan siapa yang memberikan upah atau keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) tersebut kepada HUMINCA SIAHAAN dalam menjual dan menulis nomor angka tebakan togel tersebut ?

10. Menurut keterangan dari HUMINCA SIAHAAN bahwa HUMINCA SIAHAAN mengetahui nomor angka tebakan togel yang telah dikeluarkan pihak bandar untuk menentukan yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai tersebut adalah dapat diketahui dengan cara membuka dari internet dan atau juga WAK MIN yang memberitahukan kepada HUMINCA SIAHAAN, mendapatkan upah atau keuntungan dari hasil penjualan nomor angka tebakan sebesar 20 % (dua puluh persen) tersebut dari WAK MIN.

Berapakah hadiah uang tunai dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut ? Dan apakah HUMINCA SIAHAAN ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut ?

11. Permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN yaitu untuk memasang uang taruhannya paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan tertinggi tidak terbatas berapa saja boleh jumlahnya dan pemasang wajib menebak 2 (dua) angka paling rendah dan paling banyak 4 (empat) angka selanjutnya apabila nomor angka yang dibeli oleh pemasang sesuai dengan nomor angka tebakan yang keluar maka hadiahnya untuk 2 (dua) angka x 1.000,- hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka x Rp. 1.000,- hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka x 1.000,- hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila pemasang angka tebakannya tidak keluar akan dikatakan kalah atau tidak kena serta uang pasangan / taruhannya untuk bandar dan setelah diselidiki dan dilakukan Interogasi terhadap HUMINCA SIAHAAN, ianya (HUMINCA SIAHAAN) mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Jika demikian, apakah permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai ?

12. Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh HUMINCA SIAHAAN tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, dikarenakan orang-orang yang singgah atau duduk di warung Intong tersebut yang Di Desa sumber makmur Kec Lima Puluh kota Kab Batu Bara mengetahui serta melihat HUMINCA SIAHAAN melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Jika demikian dipertanyakan kepada saudara apa fungsi dari barang-barang yang saudara simpankan dari saudara HUMINCA SIAHAAN tersebut, ? Jelaskan

13. Dapat saya terangkan dapun fungsi dari barang-barang tersebut Antara lain :

Bersambung ke hal. 04

- a. Satu unit handphone Samsung android type A035 berwarna hitam tersebut HUMINCA SIAHAAN gunakan sebagai alat saya untuk mengirim nomor pasangan togel yang di pesan dari pemain dan kemudain HUMINCA SIAHAAN kirim kepada laki laki bernama Wak Min
- b. Satu unit handphone Nokia berwarna biru tersebut HUMINCA SIAHAAN pergunakan untuk berkomunikasi dan ada juga yang mengirimkan nomor pasangan dengan cara meng sms HUMINCA SIAHAAN
- c. Uang Sejumlah Rp 700.000 (tuju ratus ribu ruplah) tersebut adalah uang yang di amankan dari HUMINCA SIAHAAN pada saat ia sedang bermain Tebakaaan jenis Togel di warung lontong yang berada di Desa sumber makmur Kec Lima Puluh kota Kab Batu Bara
- d. 2 (dua) buah pulpen tersebut HUMINCA SIAHAAN gunakan untuk menulis nomor pasangan dari pemain yang hendak memesan nomor togel dari HUMINCA SIAHAAN

14. Diperlihatkan kepada Sdra sekarang ini 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6501 WBJ, tersebut apakah saudara mengenali dengan satu unit sepeda motor yang di perlihatkan kepada saudara tersebut ? Jelaskan _____

— 14. Ya, benar yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya sekarang ini berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 6501 WBJ, Tersebut adalah satu buah sepeda motor yang di gunakan HUMINCA SIAHAAN pada saat di amankan asat sedang bermain tebakaa angka jenis togel tersebut _____

15. Sudah benarkah semua keterangan yang telah Saudara berikan diatas ? Dan apakah masih ada keterangan lain yang perlu Saudara tambahkan dalam pemeriksaan ini ? _____

— 15. Keterangan saya tersebut diatas seluruhnya sudah benar dan tidak ada keterangan yang lain yang perlu saya tambahkan dalam pemeriksaan saat sekarang ini. _____

16. Pada saat Saudara dimintai keterangan, apakah Saudara ada merasa dipaksa atau di intimidasi / dipengaruhi baik oleh pihak Penyidik dan Penyidik Pembantu ataupun pihak-pihak lain ? _____

— 16. Pada saat saya memberikan keterangan, saya tidak ada dipaksa ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa ataupun pihak-pihak lain. _____

— Hingga disini pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian dibaca kembali oleh yang dipenksa (baca sendiri.red) dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, kemudian yang dipenksa menyetujui dan membenarkan keterangannya, dan untuk menguatkan keterangannya lanya membubuhkan tanda tangan dibawah ini. _____

Yang Dipenksa,

(PARLIN SILALAH)

— Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas di Polres Batu Bara. _____

Pemeriksa,
Penyidik

RH TAMBUNAN SH MH
IPDA NRP 87070141

Penyidik Pembantu

HANRISAL SILAEN SH
BRIPTU NRP 93010449